

BAB II

DINAMIKA DOKTRIN PERTAHANAN INDONESIA

Bab ini bertujuan untuk menjabarkan dinamika Doktrin Pertahanan Indonesia pada dua periode yaitu periode Demokrasi Terpimpin (1959-1965) dan periode Orde Baru (1966-1998). Analisa bab ini menggunakan pemikiran Barry Posen tentang tiga dimensi dalam doktrin militer, yaitu : dimensi ofensif-defensif, dimensi integrasi-disintegrasi dan dimensi inovasi-stagnasi. Untuk kasus Indonesia analisa akan dibatasi pada dimensi ofensif-defensif dari suatu doktrin militer yang dapat ditelusuri dari karakteristik operasi-operasi militernya. Melalui penelusuran karakteristik operasi-operasi militernya akan diketahui apakah doktrin militernya memberikan arahan yang sifatnya ofensif atau defensif. Telaah doktrin pertahanan Indonesia akan dijabarkan dalam sub-bab yang memuat perkembangan doktrin dan strategi militer serta operasi-operasi militer yang digelar pada kedua periode tersebut.

2.1. Periode Demokrasi Terpimpin (1959-1965)

Sub-bab ini akan membahas mengenai perkembangan Doktrin Pertahanan Rakyat dan Doktrin Perang Wilayah/Perang Rakyat Semesta serta operasi-operasi militer yang digelar pada periode Demokrasi Terpimpin. Operasi-operasi militer yang digelar dalam rangka perebutan Irian Barat (Tri Komando Rakyat/Trikora), menghadapi ancaman neo-kolonialisme Inggris di Malaysia (Dwi Komando Rakyat/Dwikora) operasi-operasi keamanan dalam negeri (Operasi Kamdagri) yang meliputi penumpasan pemberontakan DI/TII dan Republik Maluku Selatan (RMS).

2.1.1. Perkembangan Doktrin

Periode ini memadukan Doktrin Pertahanan Rakyat serta Doktrin Perang Wilayah/Perang Rakyat Semesta dengan konsepsi dasar yang menekankan pada Sishanta (Sistem Pertahanan Semesta). Doktrin Pertahanan Rakyat yang ditetapkan melalui UU No. 29/1954 tentang Pertahanan Negara Republik Indonesia dimana diatur dalam Bab II Pasal 4 yang menyatakan bahwa :

“Pertahanan Negara Republik Indonesia bersifat pertahanan rakyat yang teratur dan yang diselenggarakan di bawah pimpinan Pemerintah Republik Indonesia”.²²

Sedangkan Doktrin Perang Wilayah/Perang Rakyat Semesta ditetapkan dalam Ketetapan MPRS No. II/1960 Bab III dimana konsep doktrin ini adalah merupakan pengalaman Perang Kemerdekaan yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi baru.²³

Ketetapan ini diperkuat dengan keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara-Republik Indonesia pada 3 Desember 1960 yang menetapkan Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Sementara Berencana Tahapan Pertama 1961-1969 yang dimuat dalam peraturan Penguasa Perang Tertinggi (Peperiti) No. 169/1960 dimana ketetapan itu mengatur :

“Politik keamanan pertahanan Republik Indonesia berdasarkan Manifesto Politik Republik Indonesia beserta perperinciannya dan berpangkal kepada kekuatan rakyat dengan bertujuan menjamin keamanan pertahanan nasional serta turut mengusahakan terselenggaranya perdamaian dunia.”

“Pertahanan Negara Republik Indonesia bersifat defensif-aktif dan bersifat anti-kolonialisme dan anti-imperialisme dan berdasarkan pertahanan rakyat semesta yang berintikan tentara suka rela dan milisi.”

Pemahaman yang dapat ditarik dari undang-undang tersebut diatas adalah, dalam rangka pertahanan negara diterapkan pola-pola operasi yang sifatnya defensif-aktif dengan prinsip anti kolonialisme dan anti imperialisme sebagai sendi-sendi utamanya serta TNI yang merupakan tulang punggung utama pertahanan negara dengan dibantu oleh rakyat terlatih yang dapat dimobilisasi sebagai kekuatan cadangan Angkatan Perang.

²² Departemen Angkatan Darat, “Doktrin Perang Wilayah, (Jakarta : Departemen Angkatan Darat, 1962), hal. 7.

²³ Pusat Sejarah dan Tradisi TNI, *Sejarah TNI Jilid III 1960-1965*, (Jakarta : Markas Besar TNI dan Pusat Sejarah dan Tradisi TNI, 2000), hal. 64.

2.1.2. Komando Mandala

Tri Komando Rakyat (Trikorra) yang dikumandangkan Presiden Soekarno pada 19 Desember 1961 di Yogyakarta setelah sebelumnya perjuangan diplomasi Indonesia dan Belanda tentang status Irian Barat mengalami kebuntuan. Hal ini ditindaklanjuti dengan Penetapan Presiden selaku Panglima Besar Koti Permirhar No. 1 tahun 1962 tanggal 2 Januari 1962 yang menyatakan : membentuk Propinsi Irian Barat dengan ibu kotanya Kotabaru (sekarang Jayapura) serta membentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat.²⁴

Berdasarkan ketetapan tersebut, maka dibentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat dengan Mayor Jenderal Soeharto sebagai Panglima Komando Mandala. Komando Mandala bertujuan untuk merebut Irian Barat dari kekuasaan Belanda yang berusaha mempertahankannya, merupakan operasi gabungan ketiga matra yaitu darat, laut dan udara yang akan dilaksanakan dalam 3 tahap dalam jangka waktu tiga tahun yaitu :

1. Fase infiltrasi : mengadakan penyusupan pasukan-pasukan kecil untuk mempersiapkan pembentukan pos-pos terdepan bagi persiapan penyerbuan pasukan yang lebih besar. Dalam fase ini akan disusupkan 10 kompi Angkatan Darat dan ditargetkan selesai pada akhir tahun 1962.
2. Fase eksploitasi : merupakan perencanaan terhadap serangan terbuka yang diperkirakan akan dilancarkan pada awal tahun 1963 untuk menghancurkan kekuatan militer serta merebut wilayah yang masih dikuasai Belanda dengan mengerahkan seluruh kekuatan militer Indonesia di Irian Barat.
3. Fase konsolidasi : mengadakan konsolidasi kekuasaan RI di seluruh Irian Barat setelah berhasilnya operasi militer yang diperkirakan selesai pada awal tahun 1964.

Pada fase infiltrasi, Angkatan Darat Mandala (Adla) bertugas mengembangkan pasukan dan pangkalan di kawasan darat, mengembangkan daerah depan dan mengamankan daerah belakang serta mengembangkan pangkalan angkatan lain. Dalam Infiltrasi Adla direncanakan akan dibagi ke dalam enam gelombang dengan menerjunkan 1.115 personel.

²⁴ *Ibid*, hal. 119.

Angkatan Laut Mandala (Alla) bertugas mengamankan dan melindungi infiltrasi, melakukan pengintaian, dan pendaratan pasukan serta melakukan *resupply* secara infiltrasi. Alla sebagai komponen utama Komando Mandala bertujuan untuk perebutan keunggulan di laut dan pelaksanaan operasi amfibi yang dibagi dalam tiga tahapan yaitu *show of force*, operasi amfibi dan *follow-up*. *Show of force* dilakukan untuk mencapai perimbangan kekuatan laut, mengamankan patroli laut, serta memberikan bantuan armada kepada operasi infiltrasi berupa bantuan tembakan kapal, pengawalan dan perlindungan. Operasi amfibi merupakan kombinasi dari operasi kapal cepat torpedo yang melakukan aksi gangguan, aksi pendaratan diam-diam, serta bantuan kepada operasi infiltrasi dengan operasi kapal selam dan operasi pendaratan pantai. *Follow-up* digelar untuk mendukung serangan terbuka terhadap kekuatan darat Belanda di Irian Barat.²⁵

Sementara Angkatan Udara Mandala (Aula) yang bertugas memberikan perlindungan terhadap satuan-satuan yang melakukan infiltrasi, mengadakan pengintaian, mengangkut pasukan infiltrasi dan melakukan kegiatan *Search and Rescue* (SAR) serta *resupply* udara untuk satuan infiltrasi, terdiri atas Kesatuan Tempur (KT) Senopati berkedudukan di Lanud Morotai dengan kekuatan 8 pesawat IL-28, 6 pesawat MiG-27, 2 pesawat C-47 Dakota, 1 Albatros dan 1 helikopter. KT Bimasakti berkedudukan di Laha, Ambon dengan kekuatan 4 pesawat B-25, 2 pesawat B-26 dan 1 pesawat Catalina. KT Baladewa berkedudukan di Lanud Mandai dengan kekuatan 6 pesawat C-47 Dakota dan KT Sorong berkedudukan di Lanud Langgur dengan kekuatan 6 pesawat T-51 Mustang.

Pada fase eksploitasi (Operasi Djajawijaya), disiapkan konsep operasi untuk masing-masing mandala. Adla menyiapkan 2 *Task Force Para*, 1 batalyon pasukan pendarat, dan 2 brigade sebagai cadangan. Kekuatan Alla terdiri atas Pasukan Komando Armada Tugas, Kesatuan Kapal Tjepat Torpedo (KKTT-10), Kesatuan Kapal Selam-15 (KKS-15) dan Angkatan Tugas Amphibi-17 (ATA-17). Sementara Aula menyiapkan KT Parikesit, KT Antaredja, KT Aswatama, KT Wisanjani, KT Wesiaji dan KT Anggodo.

²⁵ Suyatno Hadinoto dalam Andi Widjajanto, *Evolusi Doktrin Pertahanan Indonesia 1945-1998*, *Op. Cit*, hal.10.

Operasi-operasi militer yang digelar dalam kerangka Komando Mandala (Trikorra) diawali dengan operasi pra-infiltrasi melalui laut yang dipimpin oleh Mayor Roedjito. Operasi ini bertujuan untuk mengumpulkan keterangan tentang kekuatan militer Belanda, membangkitkan semangat perlawanan rakyat Irian Barat dan membentuk basis pasukan. Kemudian digelar operasi-operasi pada fase infiltrasi yang meliputi pengintaian, penerjunan pasukan serta penyusupan ke daerah lawan untuk mempersiapkan pembentukan pos-pos terdepan bagi persiapan penyerbuan pasukan yang lebih besar. Operasi infiltrasi dilaksanakan dalam enam gelombang yaitu : Operasi Benteng 1 dan 2 pada tanggal 26 April 1962 (79 personel), Operasi Garuda pada tanggal 15-17 Mei 1962 (132 personel), Operasi Serigala pada tanggal 17-19 Mei 1962 (120 personel), Operasi Naga pada tanggal 24 Juni 1962 (215 personel), Operasi Radjawali pada tanggal 1 Agustus 1962 (71 personel) dan Operasi Djataju pada tanggal 14 Agustus 1962 (273 personel).²⁶

Operasi infiltrasi kemudian disusul dengan operasi *show of force* merupakan operasi infiltrasi melalui laut yang dikendalikan oleh Alla. Operasi *show of force* mulai digelar pada bulan Maret sampai Juni 1962, yang terdiri atas Operasi Antareja (operasi kapal selam) yang bertugas mengadakan pengintaian terhadap kota-kota pelabuhan sepanjang pantai Irian Barat, Operasi Aluraga bertugas menenggelamkan kapal-kapal perang dan niaga Belanda di sepanjang pantai utara barat dan memutus bala bantuan musuh yang datang dari utara. Pengintaian juga dilakukan dengan menempatkan empat kapal selam di pelabuhan Kotabaru, Biak, Manokwari, dan Sorong melalui Operasi Tjakra yang digelar pada 20 Juli sampai 29 Juli 1962 dalam rangka persiapan operasi amfibi. Sementara itu kegiatan sabotase terhadap obyek-obyek vital untuk melumpuhkan pertahanan Belanda dilakukan melalui Operasi Lumba-lumba pada 25 Juli 1962 dengan mengerahkan RI Tjandra, RI Trisula dan RI Nagarangsang.²⁷

Penyerbuan pasukan yang sedianya digelar pada fase eksploitasi melalui operasi gabungan Djayawijaya urung dilaksanakan karena perundingan antara delegasi Belanda dan Indonesia di Washington telah mencapai kata sepakat untuk

²⁶ Pusat Sejarah dan Tradisi TNI, *Sedjarah ABRI*, (Jakarta: Markas Besar TNI dan Pusat Sejarah dan Tradisi TNI, 1971), hal. 119.

²⁷ Pusat Sejarah dan Tradisi TNI, *Sejarah TNI Jilid III, Op. Cit.*, hal. 135.

menyelesaikan sengketa Irian Barat secara damai. Selanjutnya operasi diarahkan untuk mengawal dan mengamankan Irian Barat pada masa-masa peralihan melalui operasi Sadar dan operasi Wisnumurti.

Operasi militer di Irian Barat berkarakter ofensif, hal ini dapat dilihat dari konsep operasi yang dirancang dengan mengkombinasikan ketiga matra yaitu darat, laut dan udara dengan pentahapan operasi untuk hasil yang maksimal dalam waktu yang singkat.

2.1.3. Komando Mandala Siaga

Dwikora yang dikumandangkan Presiden Soekarno dalam rangka membendung neo-kolonialisme Inggris di Malaysia diteruskan dengan pembentukan komando gabungan antar angkatan yaitu Komando Siaga (Koga) yang dibentuk berdasarkan Kpt. Pres/Pangti ABRI/KOTI No. 32/KOTI 1964 tanggal 2 Juni 1964 dengan Laksamana Madya Omar Dani sebagai Panglima Siaga. Panglima Koga membawahi komponen Angkatan Darat, komponen Angkatan Laut, komponen Angkatan Udara dan komponen Angkatan Kepolisian serta dibantu oleh enam staf gabungan yang terdiri atas : Gabungan 1 (intelejen), Gabungan 2 (operasi dan latihan), Gabungan 3 (personalia), Gabungan 4 (logistik), Gabungan 5 (teritorial), dan Gabungan 6 (komunikasi). Komando Siaga kemudian mengalami penyempurnaan organisasi menjadi Komando Mandala Siaga (Kolaga) berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 9/KOTI 1965 tanggal 28 Februari 1965 dengan Laksamana Madya Adam Omar Ashari sebagai Panglima Kolaga.²⁸

Pangkolaga membawahi Komando Mandala I dengan Panglima Jenderal TNI A.J. Mokoginta dan Komando Mandala II dengan Panglima Mayor Jenderal M. Panggabean serta kesatuan-kesatuan yang tergabung dalam Komando Strategis Siaga (Kostraga) AURI, Komando Armada Siaga (Koarga) ALRI, Komando Logistik Siaga (Kologga) yang terdiri atas semua unsur Komando Angkatan Militer termasuk Kepolisian. Selain itu Pangkolaga membentuk tiga Satuan Tugas (Satgas) yaitu : Satgas Rencong (terdiri atas Brigif 2 Brawijaya dan Brigif 15 Siliwangi), Satgas Cakra (terdiri atas satu Brigade KKO), dan Satgas Mandau

²⁸ *Ibid*, hal. 145.

(terdiri atas satu Brigade Infanteri 5 Diponegoro, serta 3 batalyon lepas yaitu Batalyon 521, 510 dan Batalyon 1 Brimob).

Pada perkembangannya Satgas Mandau dihapuskan dan diganti dengan Kosatgasgab Sumpit yang bertugas untuk mengembangkan operasi militer dan non-militer dengan daerah operasi meliputi Kalimantan Timur, Sabah dan Brunei. Sementara organisasi Kolaga disempurnakan dengan pembentukan Komponen Strategis Darat Siaga (Komstradaga), Komponen Strategis Laut Siaga (Komstralaga), Komponen Strategis Udara Siaga (Komstraudga), Komponen Antar Daerah Pertahanan Sumatera (Koandahansum) dan Komponen Antar Daerah Pertahanan Kalimantan (Koandahankal). Unsur-unsur ofensif dititikberatkan pada komponen strategis darat, laut dan udara sedangkan unsur-unsur defensif dititikberatkan pada Koandahansum dan Koandahankal.

Operasi-operasi militer yang digelar dalam kerangka Dwikora bertujuan untuk menjaga daerah-daerah perbatasan dari pelanggaran-pelanggaran lintas batas oleh lawan serta perlindungan kepada gerilyawan yang menyusup ke daerah lawan. Selain melalui darat infiltrasi juga dilakukan melalui perairan dan udara yaitu dengan menerjunkan anggota-anggota KKO AL di pantai Barat Malaka pada 17 Agustus 1964 (100 personel) serta penerjunan melalui pesawat-pesawat AURI pada 1 September 1964 (30 personel). Selain itu Komponen Komstralaga juga bertugas merencanakan, menyiapkan dan melaksanakan serang balas dan operasi khusus yang bertujuan menghancurkan Singapura yang memiliki arti geografis, ekonomis maupun strategi militer. Dalam pelaksanaannya, operasi ini berhasil menyusupkan personel ke Singapura dan meledakkan Hotel MacDonalld yang memberikan arti penting bagi perjuangan konfrontasi Indonesia di Malaysia.

Konsep operasi-operasi militer yang dirancang dalam Komando Siaga menunjukkan operasi militer yang karakteristiknya defensif. Dengan konsep operasi yang lebih menekankan pada serangan-serangan *pre-emptive* melalui penyusupan dan sabotase di daerah lawan serta perlindungan terhadap daerah-daerah perbatasan dan infiltran, merepresentasikan doktrin pertahanan Indonesia yang sifatnya defensif.

2.1.4. Operasi Keamanan Dalam Negeri

Selain operasi militer eksternal, selama periode Demokrasi Terpimpin, TNI juga menggelar berbagai operasi keamanan dalam negeri (kamdagri) yang digelar sehubungan dengan maraknya pemberontakan-pemberontakan dalam negeri yang dapat mengancam keutuhan NKRI. Diantaranya adalah penumpasan DI/TII di Jawa Barat, Aceh, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan, serta penumpasan RMS di Maluku.

Operasi-operasi keamanan dalam negeri yang digelar untuk menumpas pemberontakan-pemberontakan bersenjata dalam pelaksanaannya sangat mengandalkan dukungan masyarakat sekitar basis pemberontak selain kekuatan utama yaitu pasukan TNI. Hal ini dapat dilihat dalam operasi-operasi penumpasan DI/TII di Jawa Barat, Sulawesi Selatan dan Kalimantan Selatan. Operasi penumpasan DI/TII di Jawa Barat dilaksanakan Kodam VI/Siliwangi dengan bantuan Kodam VII/Diponegoro dan Kodam VIII/Brawidjaja mengandalkan peranan rakyat dalam strategi isolasi total yang kemudian dikembangkan menjadi “pagar betis” dalam operasi Cepat dan operasi Brata Yudha. Strategi ini terbukti efektif memerangkap musuh dan memutus jaringan logistik mereka sehingga dalam waktu singkat musuh dapat dilaumpuhkan. Sementara di Sulawesi Selatan pada awalnya pasukan TNI kesulitan untuk melakukan operasi sebab pemberontak merusak jalan dan jembatan untuk menghambat gerak maju pasukan TNI. Selain itu mereka membakar pemukiman penduduk, dan memaksa penduduk ikut bergerilya ke hutan dan menjadikan mereka sebagai tameng apabila mendapat serangan dari pasukan TNI, ikatan kekeluargaan yang erat antara pemberontak dengan masyarakat Sulawesi Selatan juga turut menyulitkan pasukan TNI untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat. Pada akhirnya dilaksanakan operasi Guntur yang konsep operasinya dirancang dengan tujuan untuk mengembalikan pengungsi serta membangun kembali rumah, jalan dan jembatan yang dirusak oleh pemberontak, kemudian dilanjutkan dengan pembinaan teritorial dan mengembalikan kehidupan penduduk kepada kehidupan yang normal. Ketika simpati penduduk mulai beralih kepada pasukan TNI, kemudian digelar operasi Kilat dengan tujuan menghancurkan sumber-sumber

logistik DI/TII dilanjutkan dengan operasi Tekad untuk menangkap sisa-sisa pemberontak.

Pelaksanaan operasi kamdagri didasarkan pada tiga operasi pertahanan yaitu operasi intelejen, operasi tempur dan operasi teritorial. Dalam implementasinya ketiga pola ini dapat berurutan namun dapat juga disesuaikan dengan kondisi lapangan. Seringkali kedekatan emosional antara pemberontak dengan penduduk sekitar menjadikan simpati mereka beralih kepada pihak lawan sehingga pasukan TNI mendahulukan operasi teritorial dahulu untuk pembinaan dan memutus kedekatan mereka barulah setelah itu dilaksanakan operasi tempur untuk membasmi pemberontak.

Pelaksanaan operasi keamanan dalam negeri yang ditujukan untuk menghadapi pemberontakan-pemberontakan bersenjata didominasi oleh unsur-unsur ofensif yaitu melalui strategi isolasi total yang bertujuan untuk memutus jaringan logistik musuh, mengisolasi ruang geraknya serta memerangkapnya ke dalam suatu titik dimana hal ini sangat efektif untuk membantu memudahkan pelaksanaan operasi tempur yang bertujuan untuk menumpas dan menghancurkan basis pemberontak.

Berikut adalah tabel operasi-operasi militer yang dilaksanakan pada periode Demokrasi Terpimpin :

Tabel 2.1
Operasi-operasi militer yang digelar pada periode
Demokrasi Terpimpin (1959-1965)²⁹

| No. | Nama operasi | Karakter |
|-----|----------------------|----------|
| 1. | Operasi Lintas | Ofensif |
| 2. | Pertempuran Laut Aru | Defensif |
| 3. | Operasi Garuda Merah | Ofensif |
| 4. | Operasi Garuda Putih | Ofensif |

²⁹ Pusat Sejarah dan Tradisi TNI, *Sejarah TNI Jilid II, 1950-1959* (Jakarta : Markas Besar TNI dan Pusat Sejarah dan Tradisi TNI, 2000); Pusat Sejarah dan Tradisi TNI, *Sejarah TNI Jilid III, 1960-1965* (Jakarta: Markas Besar TNI dan Pusat Sejarah dan Tradisi TNI, 2000).

| | | |
|-----|--------------------------|----------|
| 5. | Operasi Serigala | Ofensif |
| 6. | Operasi Kancil | Defensif |
| 7. | Operasi Naga | Ofensif |
| 8. | Operasi Rajawali | Ofensif |
| 9. | Operasi Djatayu | Ofensif |
| 10. | Operasi Elang | Ofensif |
| 11. | Operasi Gagak | Ofensif |
| 12. | Operasi Alap-alap | Ofensif |
| 13. | Operasi Banteng I | Ofensif |
| 14. | Operasi Banteng II | Ofensif |
| 15. | Operasi Lumba-lumba | Ofensif |
| 16. | Operasi Antareja | Ofensif |
| 17. | Operasi Aluraga | Ofensif |
| 18. | Operasi Tjakra | Ofensif |
| 19. | Operasi Siaga (Dwikora) | Defensif |
| 20. | Operasi Kolaga (Dwikora) | Defensif |
| 21. | Operasi KKO AL | Defensif |
| 22. | Operasi AURI | Defensif |
| 23. | Operasi A/ Koti (KKO AL) | Ofensif |
| 24. | Operasi Cepat I | Ofensif |
| 25. | Operasi Cepat II | Ofensif |
| 26. | Operasi Cepat III | Ofensif |
| 27. | Operasi Cepat IV | Ofensif |
| 28. | Operasi Cepat V | Ofensif |
| 29. | Operasi Cepat VI | Ofensif |

| | | |
|-----|-------------------------|----------|
| 30. | Operasi Cepat VII | Ofensif |
| 31. | Operasi Cepat VIII | Ofensif |
| 32. | Operasi Cepat IX | Ofensif |
| 33. | Operasi Cepat X | Ofensif |
| 34. | Operasi Cepat XI | Ofensif |
| 35. | Operasi Cepat XII | Ofensif |
| 36. | Operasi Brata Yudha I | Ofensif |
| 37. | Operasi Brata Yudha II | Ofensif |
| 38. | Operasi Brata Yudha III | Ofensif |
| 39. | Operasi Brata Yudha IV | Ofensif |
| 40. | Operasi Badai | Ofensif |
| 41. | Operasi 45 | Ofensif |
| 42. | Operasi Guntur I | Ofensif |
| 43. | Operasi Guntur III | Defensif |
| 44. | Operasi Kilat I tahap 1 | Ofensif |
| 45. | Operasi Kilat I tahap 2 | Ofensif |
| 46. | Operasi Kilat II | Ofensif |
| 47. | Operasi Tekad I | Ofensif |
| 48. | Operasi Tekad II | Ofensif |
| 49. | Operasi Tekad III | Ofensif |
| 50. | Operasi Tekad IV | Ofensif |
| 51. | Operasi Delima | Ofensif |
| 52. | Operasi Segi Tiga | Ofensif |
| 53. | Operasi Riko | Ofensif |
| 54. | Operasi Nasohi | Ofensif |

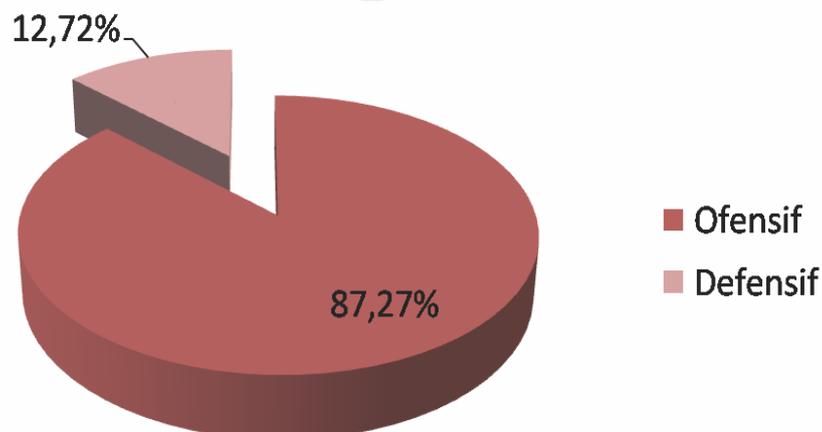
| | | |
|-----|------------------|---------|
| 55. | Operasi P. Seram | Ofensif |
|-----|------------------|---------|

Sumber : diolah dari operasi- operasi militer yang bersumber dari Pusat Sejarah dan Tradisi TNI, *Sejarah TNI Jilid II, 1950-1959* (Jakarta : Markas Besar TNI dan Pusat Sejarah dan Tradisi TNI, 2000); Pusat Sejarah dan Tradisi TNI, *Sejarah TNI Jilid III, 1960-1965* (Jakarta: Markas Besar TNI dan Pusat Sejarah dan Tradisi TNI, 2000).

Dari tabel 2.1 dapat disimpulkan bahwa pada periode Demokrasi Terpimpin operasi-operasi militer yang digelar didominasi oleh operasi militer dalam kerangka Tri Komando Rakyat (Trikorra) dengan 18 operasi militer yang seluruhnya digelar pada fase pra-infiltrasi dan infiltrasi. Sementara Komando Ganyang Malaysia yang dibentuk dalam kerangka Dwi Komando Rakyat (Dwikorra) hanya menggelar 5 operasi militer. Selebihnya operasi militer yang digelar pada periode Demokrasi Terpimpin lebih banyak untuk menghadapi pemberontakan-pemberontakan dalam negeri seperti DI/TII (30 operasi militer) serta Republik Maluku Selatan/RMS (2 operasi militer). Dari sebaran operasi militer ini pula dapat kita ketahui bahwa sebagian besar operasi militer yang digelar pada periode Demokrasi Terpimpin berkarakteristik ofensif (48 operasi militer) dan sisanya berkarakteristik defensif (7 operasi militer). Berikut adalah prosentase karakteristik operasi-operasi militer pada periode Demokrasi Terpimpin.

Grafik 2.1

Karakteristik Operasi Militer periode Demokrasi Terpimpin (1959-1965)



Grafik 2.1 menggambarkan bahwa dari 55 kali penggelaran operasi militer yang digelar pada periode Demokrasi Terpimpin, 87,27% diantaranya menekankan pada karakter ofensif sedangkan 12,72% operasi militer sisanya berkarakteristik defensif. Hal ini menunjukkan bahwa doktrin pertahanan Indonesia yang merupakan pedoman bagi penyelenggaraan operasi-operasi militer pada periode Demokrasi Terpimpin lebih menekankan pada karakter ofensif.

2.2. Periode Orde Baru (1966-1998)

Sub-bab ini akan membahas mengenai perkembangan Doktrin Tri Ubaya Cakti 1966, Doktrin Catur Darma Eka Karma 1967, Doktrin Catur Darma Eka Karma 1988, Doktrin Pertahanan Keamanan 1991, Doktrin Sad Daya Dwi Bakti 1994 serta operasi-operasi militer yang digelar pada periode Orde Baru. Operasi-operasi militer yang digelar lebih banyak bersifat internal yaitu dalam rangka penumpasan G 30 S/PKI dan menghadapi gerakan-gerakan separatis bersenjata seperti Organisasi Papua Merdeka (OPM), Gerakan Aceh Merdeka (GAM), pemberontakan PGRS/Paraku dan Operasi kontra-terorisme serta operasi militer eksternal yaitu aneksasi Timor Timur

2.2.1. Perkembangan Doktrin

Pada periode Orde Baru doktrin pertahanan mengalami berbagai perkembangan dan penyesuaian yang berkaitan dengan pola-pola operasi pertahanan. Doktrin-doktrin tersebut adalah : Doktrin Tri Ubaya Cakti 1966, Doktrin Catur Darma Eka Karma 1967, Doktrin Catur Darma Eka Karma (Cadek) 1988, Doktrin Pertahanan Keamanan 1991 serta Doktrin Penampilan TNI Sad Daya Dwi Bakti 1994.

Doktrin Tri Ubaya Cakti dirumuskan ulang dalam Seminar AD II pada 25-31 Agustus 1966 mengandung tiga doktrin dasar yaitu : Doktrin Pertahanan Darat Nasional (Hanratnas), Doktrin Kekayaan dan Doktrin Pembinaan serta doktrin pelaksanaannya yaitu Doktrin Perang Rakyat Semesta. Pengembangan strategi

perang dan operasi militer dikembangkan dalam Doktrin Hanratnas yang memandang bahwa perang adalah :³⁰

1. Perang merupakan jalan terakhir untuk menyelesaikan pertikaian dan hanya akan dilakukan jika dipaksakan kepada Bangsa Indonesia yang cinta damai.
2. Perang adalah “cara menyelesaikan sengketa” yang dipaksakan terhadap Bangsa Indonesia dalam perjuangannya untuk :
 - a. menjamin kemerdekaan dan kedaulatan Negara dan wilayahnya.
 - b. mengamankan Revolusi Pancasila terhadap tantangan-tantangan kontra-revolusi dari dalam maupun luar negeri.
 - c. memberi materiil dan spirituil pada kemerdekaan NKRI yang berfalsafah Pancasila sesuai dengan kemerdekaan bangsa.
3. Perang merupakan jalan terakhir dalam membela dan menjamin kepentingan dan aspirasi nasional, materiil dan spirituil oleh karena itu :
 - a. Perang bersifat wajib bela negara yang dijalankan secara dinamis- aktif dengan pola-pola defensif strategis dan ofensif –strategis yang singkatnya disebut defensif-aktif.
 - b. Perang menyangkut dan karena itu menjadi tanggung jawab seluruh bangsa yang berbentuk Perang Rakyat Semesta dengan mengerahkan seluruh potensi negara, rakyat dan wilayah Indonesia.

Doktrin Hanratnas juga memuat konsepsi Perang Rakyat Semesta (Perata) yang pada intinya membagi pola-pola operasi menjadi Operasi Pertahanan yang memiliki unsur-unsur defensif-aktif ditujukan untuk menghadapi ancaman dari luar dan Operasi Keamanan dalam Negeri (Kamdagri) yang ditujukan untuk menghadapi ancaman dari dalam dengan unsur-unsur : Operasi Intelejen yaitu pengintaian dan penyidikan yang bertujuan untuk memperoleh faktor-faktor sebagai bahan perencanaan dan pelaksanaan operasi tempur maupun operasi teritorial, Operasi Tempur yaitu pengejaran dan penghancuran gerakan bersenjata

³⁰ Departemen Pertahanan Keamanan, Hasil Seminar Hankam ke I : Doktrin Perjuangan TNI-AD “Tri Ubaya Çakti”, (Jakarta : Dephankam, 1966), hal. 66

sehingga tercapai kondisi-kondisi untuk operasi teritorial, dan Operasi Teritorial yang digelar untuk penguasaan dan pembinaan wilayah.

Dalam pelaksanaannya Konsepsi Perata juga didukung oleh Pola Logistik dan Pola Pembinaan. Pola Logistik bertumpu pada mobilisasi seluruh sumber daya nasional dengan rakyat sebagai komponen cadangan. Sedangkan Pola Pembinaan meliputi aspek pembinaan wilayah yang menekankan pada kesejahteraan masyarakat, serta aspek Pembinaan Teritorial yang menekankan pada dimensi pertahanan wilayah yang dibagi dalam lima daerah strategis yaitu : daerah wilayah musuh, daerah jalan pendekat strategis, daerah sasaran strategis, daerah basis strategis dan daerah udara.

Doktrin Catur Darma Eka Karma 1967 yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Utama Bidang Pertahanan Keamanan Nomor : KEP/B/177/1966 tanggal 21 November 1966 tetap mempertahankan konsep perang rakyat semesta sebagai konsep dasar pertahanan negara. Pola-pola operasi tetap mempertahankan Operasi Pertahanan dan Operasi Kamdagri. Klasifikasi daerah strategis yang terdapat pada Doktrin Tri Ubaya Cakti dioperasionalkan dengan kekuatan TNI yang meliputi unsur unsur : ³¹

- a. Unsur strategi yang dapat meniadakan usaha-usaha dan persiapan-persiapan operasi musuh terhadap kepulauan Indonesia.
- b. Unsur strategi yang mampu menangkis gerakan musuh di laut dan di udara sebelum mereka dapat mendaratkan pasukan-pasukan di wilayah Negara.
- c. Unsur Hanudnas yang mampu menangkis serangan udara pihak musuh sebelum mereka mencapai obyek vital Negara.
- d. Unsur Hanmarnas yang mampu menghalau dan menggagalkan setiap serangan musuh serta menghancurkan kesatuan-kesatuan musuh yang memasuki dan membahayakan wilayah perairan teritorial Negara sebelum mereka menyerang objek vital baik di laut maupun di pantai.
- e. Unsur gabungan angkatan bersenjata yang mampu menangkis pendaratan-endaratan musuh.

³¹ Departemen Pertahanan Keamanan, Doktrin Hankamnas dan Doktrin Perjuangan ABRI "Catur Darma Eka Karma", (Jakarta : Dephankam, 1967), hal. 48.

- f. Unsur-unsur teritorial dan perlawanan rakyat (Wanra) yang mampu mengadakan pertahanan nasional dalam jangka panjang, yang bergerak di darat dan di laut sebagai unsur-unsur dari pertahanan udara nasional, pertahanan maritim nasional dan unsur-unsur gabungan angkatan bersenjata yang mampu menangkis pendaratan musuh.
- g. Unsur-unsur yang mampu menanggulangi gangguan dalam negeri berupa infiltrasi, subversi dan pemberontakan.

Ketujuh unsur kekuatan militer tersebut ditetapkan oleh Presiden Soeharto melalui pembentukan tujuh Komando Utama Operasionil Hankam/ABRI (Kotama Ops) yaitu : Komando Antar-Daerah Pertahanan (Koandahan), Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas), Komando Pertahanan Pantai (Maritim) Nasional (Koppanmarnas), Komando Pasukan Komando, Komando Cadangan Strategis (Kocadstrat), Satuan Tugas Gabungan (Satgasgab) dan Mandala Luar Wilayah Nasional.³²

Pembentukan tujuh kotama ini diikuti dengan pembentukan Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) pada 12 November 1965 melalui Keputusan presiden No. 162/Koti/1965 dan menunjuk Mayor Jenderal Soeharto sebagai panglimanya. Tugas pokok Kopkamtib pada awalnya adalah untuk memulihkan keamanan dan ketertiban akibat peristiwa Gerakan 30 September 1965, serta mengembalikan kewibawaan pemerintah dengan pelaksanaan operasi fisik, militer dan mental.³³ Langkah-langkah yang diambil Kopkamtib diantaranya adalah mengeluarkan Keputusan Presiden No. I/3/1966 tanggal 12 Maret 1966 yang mengatur tentang pembubaran PKI termasuk kegiatan-kegiatan organisasinya dari tingkat pusat sampai daerah. Kopkamtib juga menggelar operasi-operasi militer untuk melakukan penumpasan terhadap anggota PKI melalui Operasi Trisula, Operasi Kikis, Operasi MMC, Operasi Purwodadi serta operasi yustisional yang meliputi pemeriksaan dan mengadili perkara yang sasarannya adalah tokoh-tokoh PKI. Peran Kopkamtib semakin luas dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden No. 9/1974. Keppres ini menetapkan Kopkamtib sebagai “sarana pemerintah yang bertujuan memelihara dan

³² Andi Widjajanto, *Op. Cit.*, hal. 13.

³³ Pusat Sejarah dan Tradisi TNI, *Sejarah TNI Jilid IV, 1966-1983* (Jakarta : Markas Besar TNI dan Pusat Sejarah dan Tradisi TNI, 2000), hal. 91.

meningkatkan stabilitas dan keamanan dan ketertiban, dalam rangka mewujudkan stabilitas nasional...”³⁴ Dengan perluasan peran Kopkamtib tersebut, maka TNI menjadi aktor utama dalam pelaksanaan kegiatan pertahanan dan keamanan nasional.

Dalam perkembangannya, Doktrin Catur Darma Eka Karma 1967 mengalami penyesuaian melalui Keputusan Panglima ABRI No : KEP/04/II/1988 tanggal 27 Februari 1988. Doktrin Catur Darma Eka Karma (Cadek) 1988 mengandung konsepsi pertahanan keamanan negara yang diwujudkan dalam suatu sistem pertahanan keamanan rakyat semesta (sishankamrata) yang dikembangkan dengan mendayagunakan segenap sumber daya nasional dan prasarana nasional secara menyeluruh, terpadu dan terarah dengan politik pertahanan keamanan negara yang bersifat defensif-aktif serta preventif-aktif diarahkan untuk menjamin keamanan dalam negeri, turut serta memelihara perdamaian dunia pada umumnya dan keamanan di kawasan Asia Tenggara pada khususnya.³⁵

Doktrin Cadek 1988 masih menggunakan pola operasi doktrin sebelumnya yang dibagi atas : pola operasi pertahanan dan pola operasi kamdagri. Terdapat konsepsi baru dalam rangkaian pola operasi pertahanan yaitu : pertama, Operasi penciptaan kondisi untuk mencegah timbulnya perang dengan kegiatan intelejen strategis dan diplomasi. Kedua, Operasi konvensional untuk menghancurkan serbuan musuh baik sejak persiapan di wilayahnya, dalam perjalanan maupun setelah berhasil mendarat dan menduduki sebagian atau seluruh wilayah Nusantara. Ketiga, Operasi perlawanan wilayah untuk menghancurkan musuh dengan kegiatan operasi gerilya untuk mengungguli kekuatan musuh. Keempat, Operasi serangan balas untuk menghancurkan dan melemparkan musuh ke luar wilayah nusantara. Kelima, Operasi pemulihan keamanan dan penyelamatan masyarakat dengan kegiatan konsolidasi, rehabilitasi dan stabilisasi.

Pada Doktrin Cadek 1988 juga mulai ditetapkan stratifikasi Doktrin TNI-ABRI yang pada intinya memuat susunan hirarki piranti lunak TNI yang berfungsi sebagai pedoman maupun ketentuan-ketentuan yang mengatur segenap

³⁴ Andi Widjajanto, *Op. Cit.*, hal. 15.

³⁵ Departemen Pertahanan Keamanan, Doktrin Perjuangan TNI-ABRI “Catur Darma Eka Karma”, (Jakarta : Dephankam, 1988), hal. 48.

pola tindak TNI baik secara perorangan maupun organisasi.³⁶ Berikut adalah tabel stratifikasi doktrin TNI yang dijabarkan ke dalam lima strata :

Tabel 2.2
Stratifikasi Doktrin TNI-ABRI³⁷

| Stratifikasi Doktrin | Jenis Doktrin |
|-----------------------------|---|
| Doktrin Dasar | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Wawasan Nusantara ▪ Ketahanan Nasional |
| Doktrin Induk | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dwifungsi ABRI ▪ Konsepsi Pertahanan dan Keamanan Negara ▪ Konsepsi Kesejahteraan Negara |
| Doktrin Pelaksanaan | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Doktrin Pertahanan Keamanan ABRI ▪ Doktrin Sosial Politik ABRI ▪ Pola Operasi Pertahanan ▪ Pola Operasi Keamanan Dalam Negeri ▪ Pola Operasi Sosial Politik |
| Petunjuk ABRI | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembinaan Kemampuan dan Kekuatan ABRI |
| Petunjuk Angkatan | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembinaan Kemampuan dan Kekuatan Angkatan |

Sumber : Diolah dari Keputusan Panglima Angkatan Bersenjata No : Kep/04/II/1988 tentang Doktrin Perjuangan TNI-ABRI “Catur Darma Eka Karma (CADEK)”

Klasifikasi lima daerah strategis yang dijabarkan pada Doktrin Tri Ubaya Cakti dan Cadek mengalami perubahan pada Doktrin Pertahanan Keamanan 1991 yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan No : KEP/17/x/1991 tanggal 5 Oktober 1991. Penyiapan medan pertahanan yang sebelumnya dibagi dalam lima daerah strategis kini diproyeksikan dalam tiga lapis yaitu : Lapis pertama adalah medan pertahanan penyanggah yang berada di luar garis batas zona ekonomi eksklusif dan lapisan udara di atasnya. Lapis kedua adalah medan pertahanan utama, yang direncanakan sebagai medan operasi yang menentukan, yaitu dari laut zona ekonomi eksklusif sampai dengan laut teritorial dan lapisan udara di atasnya. Lapisan ketiga adalah daerah-daerah perlawanan yang berada pada wilayah kompartemen-kompartemen strategis darat, termasuk wilayah perairan nusantara dan lapisan udara di atasnya, yang dibangun atas dasar sejumlah daerah pangkal pertahanan dan perlawanan sebagai intinya.³⁸

³⁶ *Ibid*, hal. 83.

³⁷ *Ibid*, hal. 84-89.

³⁸ Departemen Pertahanan Keamanan, Doktrin Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia, (Jakarta : Dephankam, 1991), hal. 37.

Pada lapis pertahanan I TNI melakukan operasi militer yang mengandalkan penciptaan kondisi dan operasi intelejen strategis. Kedua operasi digelar agar bisa melakukan strategi tempur konvensional yang bersifat strategi ofensif dan defensif, dengan menggunakan unit-unit pasukan khusus yang dimiliki TNI AL, AU dan AD untuk melaksanakan operasi militer gabungan dengan tujuan menghilangkan niat dan kekuatan lawan yang melakukan agresi ke wilayah Indonesia. Sementara pada lapis pertahanan II TNI mengandalkan gabungan kekuatan TNI AL dan AU sebagai kekuatan pemukul utama melalui operasi laut gabungan untuk menghalangi dan mematahkan kemungkinan serangan musuh ke wilayah darat kepulauan Indonesia. Pada lapis pertahanan III TNI mengandalkan Angkatan Darat sebagai kekuatan pemukul utama dengan penerapan strategi militer berupa operasi perlawanan wilayah dan operasi serangan balas melalui operasi darat gabungan.³⁹

Doktrin Penampilan TNI ABRI Sad Daya Dwi Bakti 1994 ditetapkan melalui Keputusan Panglima Angkatan Bersenjata No : KEP/05/III/1994 tanggal 21 Maret 1994. Doktrin ini memperkenalkan konsepsi pelibatan strategis yang dititikberatkan untuk menjamin kesiapsiagaan dan ketanggapsegeraan setiap unsur pertahanan keamanan (hankam) maupun sosial politik (sospol) dengan konsep pertahanan mendalam dan berlapis yang akan menentukan gelar pelibatan kekuatan militer. Gelar pelibatan dibagi dalam :⁴⁰

- a. Palagan terpadu pertahanan, sebagai gelar pelibatan hankam untuk menghadapi ancaman dari luar negeri.
- b. Palagan terpadu keamanan, sebagai gelar pelibatan hankam untuk mengatasi ancaman dari dalam negeri.
- c. Pelibatan terpadu sosial politik sebagai gelar pelibatan sospol untuk menanggulangi segenap permasalahan yang bersifat sosial politik.

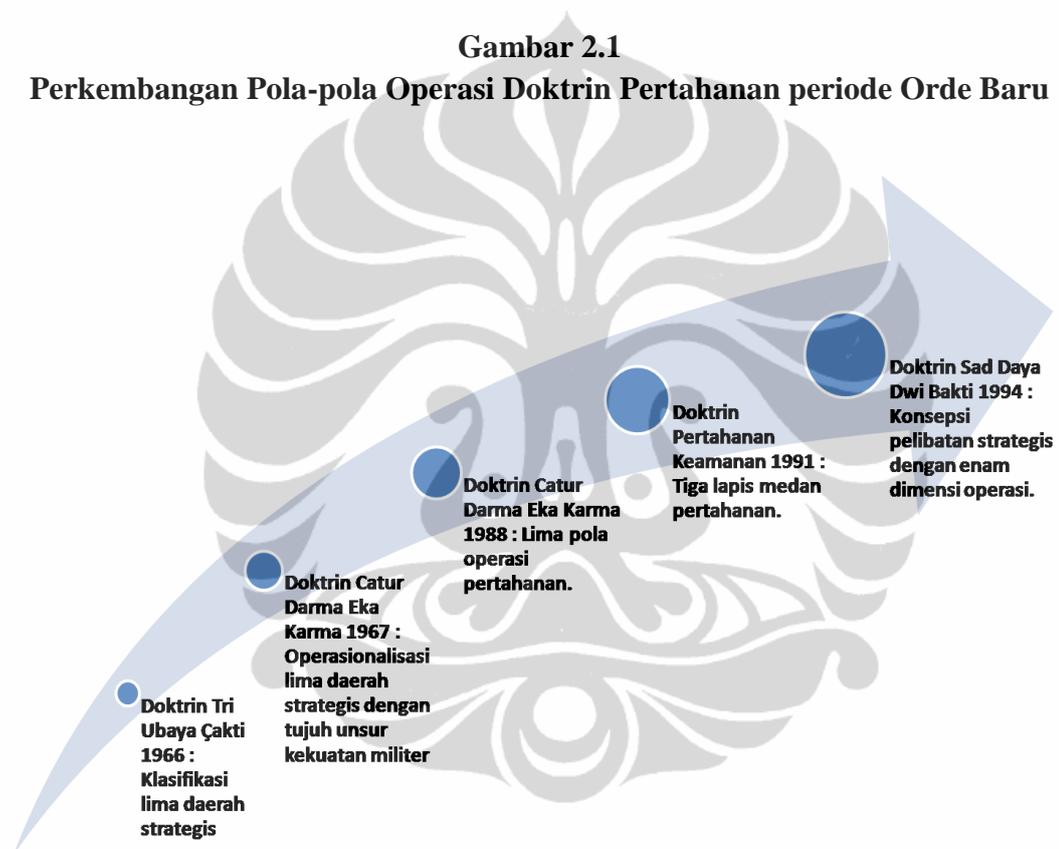
Operasionalisasi gelar pelibatan tersebut dilaksanakan melalui enam dimensi pelibatan yang meliputi : pertama, Pelibatan hankam di darat yang dikembangkan berdasarkan rancang bangun hankam wilayah daratan pulau besar dan rangkaian pulau-pulau kecil. Kedua, Pelibatan hankam di laut yang

³⁹ Andi Widjajanto, *Op. Cit*, hal. 17.

⁴⁰ Departemen Pertahanan Keamanan, Doktrin Penampilan TNI ABRI "Sad Daya Dwi Bakti", (Jakarta : Dephankam, 1994), hal 33.

dikembangkan berdasarkan konsepsi laut teritorial nusantara. Ketiga, Pelibatan hankam di udara yang dikembangkan berdasarkan konsepsi pertahanan udara nasional. Keempat, Pelibatan hankam di bidang kamtibmas dengan konsepsi keamanan dan ketertiban masyarakat terpadu. Kelima, Pelibatan dalam rangka upaya pemeliharaan perdamaian dunia dengan konsepsi peran serta dalam pasukan perdamaian PBB. Keenam, Pelibatan sospol di dalam struktur tata kehidupan nasional dengan konsepsi sosial politik TNI ABRI.

Gambar 2.1
Perkembangan Pola-pola Operasi Doktrin Pertahanan periode Orde Baru



Dari telaah kelima doktrin pada periode Orde Baru tersebut, walaupun strategi dan pola-pola operasi pertahanannya mengalami penyempurnaan dari waktu ke waktu namun secara keseluruhan kelima doktrin tersebut memiliki beberapa kesamaan karakteristik yaitu : pertama, menekankan pada konsepsi Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta dengan pelibatan seluruh sumber daya nasional melalui mekanisme mobilisasi dengan TNI sebagai tulang punggung dan rakyat sebagai kekuatan cadangan. Kedua, konsepsi dasar pertahanan negara dibagi atas pola operasi pertahanan yang bersifat defensif-aktif,

untuk mengatasi ancaman dari luar negeri dan pola operasi kamdagri untuk mengatasi ancaman dari dalam negeri dengan unsur-unsur operasi intelejen, operasi tempur dan operasi teritorial. Ketiga, mengandalkan gelar operasi terpadu baik matra tunggal maupun gabungan. Keempat, menitikberatkan pada konsepsi pertahanan berlapis.

2.2.2. Operasi Kamdagri

Operasi-operasi keamanan dalam negeri (Kamdagri) yang digelar TNI pada periode Orde Baru dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu : operasi militer penumpasan PKI, operasi militer menghadapi gerakan separatis bersenjata, serta operasi kontra-terorisme.

Operasi Trisula di Blitar, Operasi Kikis di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur, Operasi di Purwodadi serta Operasi Merapi Merbabu Complex merupakan rangkaian operasi-operasi militer yang digelar TNI dalam menumpas PKI. Di Blitar, operasi penumpasan PKI dilaksanakan oleh Kodam VIII/Brawijaya melalui Komando Operasi Trisula dengan Kolonel Witarmin sebagai Komandan yang tujuannya adalah : secara khusus menghancurkan proyek basis PKI di Blitar Selatan serta mengembalikan kewibawaan pemerintah dengan penempatan pamong desa ABRI di Blitar Selatan. Konsep operasi dibagi dalam enam tahap yaitu : tahap penjajakan, tahap penghancuran, tahap pemadatan, tahap pembersihan, tahap konsolidasi dan tahap teritorial pemerintahan sipil. Pelaksanaan operasi dibantu oleh satuan Angkatan Udara Taktis yang terdiri dari satu Kompi Pasukan Gerak Cepat (PGT), dua helikopter, dua pembom B-25, tiga Mustang, dan tiga Harvard.⁴¹ Satgas Operasi Trisula menggunakan strategi “mesin penggilas jalan” yaitu bolak balik membersihkan satu wilayah dari musuh meskipun wilayah tersebut sudah pernah dijadikan sasaran operasi. Strategi ini efektif untuk menghadapi anggota PKI yang menggunakan taktik gerilya sehingga basis lawan dengan segera dapat dihancurkan.

Sementara operasi-operasi penumpasan PKI lainnya menggunakan taktik isolasi total yang bertujuan untuk memerangkap lawan di basis pertahanannya dan memutus aliran logistik mereka. Hal ini memudahkan pasukan TNI yang

⁴¹ Sejarah Militer Kodam (Semdam) VIII/Brawijaya, dalam Pusat Sejarah dan Tradisi TNI, Sejarah TNI Jilid IV, *Op.Cit.*, hal. 109.

dibantu oleh pertahanan sipil (Hansip) dan perlawanan rakyat (Wanra) untuk menyerang ketika mereka dalam kondisi lemah karena kekurangan pangan. Setelah operasi tempur, anggota-anggota PKI yang tertangkap diklasifikasikan sesuai dengan peran sertanya dalam pemberontakan baik di Jakarta maupun di daerah, dari klasifikasi tersebut ditentukan apakah anggota PKI yang tertangkap dijatuhi sanksi pidana atau dikembalikan kepada keluarganya untuk dibina lebih lanjut.

Pola-pola operasi kamdagri yang meliputi operasi intelejen, operasi tempur dan operasi teritorial juga diterapkan dalam penumpasan gerakan separatis bersenjata. Dalam penumpasan PGRS/Paraku, pola operasi dititikberatkan pada operasi intelejen untuk pengintaian dan persiapan menyerang musuh dan operasi teritorial yaitu memisahkan gerombolan dari masyarakat, pembinaan ideologi Pancasila untuk mencegah infiltrasi dari luar serta menarik simpati penduduk dengan bantuan pangan, setelahnya dilaksanakan operasi tempur untuk menumpas gerombolan dengan dukungan penuh dari masyarakat.

Operasi penumpasan GPK OPM di Irian Barat dilaksanakan oleh Kodam XVII/ Cendrawasih dengan Letkol Moch. Toha sebagai Komandan Operasi Sadar. Konsep Operasi Sadar dibagi kedalam tiga tahapan yaitu : tahap pertama, mengamankan obyek vital, mengkonsolidasi pasukan dan melokalisasi lawan kedalam empat sub-sektor. Tahap kedua, mengisolasi gerombolan dari masyarakat dan menjauhkan mereka dari daerah subur yang dilanjutkan dengan penghancuran yang didahului dengan usaha pendekatan secara psikologis. Tahap ketiga, pelaksanaan operasi yang memadukan antara operasi intelejen, operasi tempur dan operasi teritorial.

Operasi penumpasan GAM di Aceh dilaksanakan oleh Kodam I/ Iskandar Muda dengan memadukan beberapa pola operasi. Dalam Operasi Gajah Cakti diturunkan pasukan komando khusus yang bertugas melaksanakan Operasi Sandi Yudha yang bertujuan menangkap pimpinan gerombolan, menghancurkan organisasi serta melakukan penggalangan tokoh-tokoh masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya, pasukan Sandi Yudha lebih banyak digunakan sebagai satuan tempur untuk mencari, menentukan dan menghancurkan musuh dan sisanya diperbantukan kepada komando operasi sehingga ruang gerak pasukan menjadi

terbatas. Setelah dilakukan evaluasi, maka pasukan Sandi Yudha dikembalikan kepada fungsi awalnya dan diterbitkan Perintah Operasi Jeumpa dengan daerah operasi meliputi daerah Aceh Pidie dan Aceh Utara/Timur. Operasi penumpasan GAM pelaksanaannya dititikberatkan pada operasi intelejen penggalangan, dengan pendekatan teritorial yaitu meningkatkan perlawanan rakyat melalui operasi massa di daerah Aceh Utara yang diikuti oleh 250 orang penduduk dan operasi massa di daerah Aceh Pidie dengan mengerahkan 625 orang penduduk.

Operasi kontra-terorisme yang digelar TNI pada periode Orde Baru adalah operasi pembebasan sandera pesawat DC-9 Woyla yang dibajak oleh kelompok Imron dan operasi penumpasan teror Warman di Lampung. Dalam operasi pembebasan sandera “Woyla” di Thailand, TNI yang mengerahkan satuan khusus anti teror Komando Pasukan Sandi Yudha yang dipimpin oleh Letkol Sintong Panjaitan bekerja sama dengan Pasukan Komando Thailand yang bertugas memberikan perlindungan kepada pasukan Kopasandha. Konsep operasi Woyla menggunakan strategi *first-strike attack* yang menekankan pada konsep serangan yang dirancang secara sistematis dan cepat untuk melumpuhkan musuh. Sementara operasi penumpasan teror Warman diawali dengan operasi intelejen yang dilaksanakan oleh satuan intel Kodam III/Siliwangi dan kemudian dilanjutkan dengan operasi penyergapan untuk penangkapan.

2.2.3. Operasi Seroja

Operasi Seroja merupakan satu-satunya operasi militer eksternal yang digelar selama periode Orde Baru. Operasi Seroja pada awalnya merupakan operasi kamdagri yang bertujuan untuk mengamankan daerah-daerah perbatasan antara Indonesia-Timor Portugis yang mengalami instabilitas keamanan karena gejolak politik dan keamanan di Timor Portugis. Pada perkembangannya, sejalan dengan adanya keinginan sebagian masyarakat Timor Portugis untuk berintegrasi dengan NKRI, operasi berkembang menjadi *suzainirity*, yaitu penyerahan kekuasaan dari pihak yang lemah yaitu rakyat Timor Portugis yang diwakili oleh Partai Apodeti, Kota, UDT dan Trabahista kepada pihak yang lebih kuat yaitu Pemerintah RI melalui Proklamasi Balibo pada 29 November 1975. Konsep operasi dituangkan dalam Rencana Kampanye Seroja yang terdiri atas pertama,

tahap operasi militer secara tertutup, kedua, tahap kegiatan diplomasi untuk mendukung operasi militer tertutup dan ketiga, operasi militer sesungguhnya.

Kampanye Seroja dibagi kedalam dua tahapan yaitu : tahap pertama, pengerahan 300 orang pasukan Kopasandha yang dibagi kedalam pasukan-pasukan yang lebih kecil yang disebut "tim". Pelaksanaan operasi tahap pertama ini dituangkan dalam Operasi Flamboyan yang dilaksanakan pada 25 Mei 1975 didukung Kopasandha dengan dipimpin oleh Komandan Grup II/Kopasandha Kolonel Dading Kalbuadi. Tahap kedua, pelaksanaan operasi tempur dan operasi sosial yang sifatnya tertutup, bertujuan untuk mencapai pemantapan penguasaan daerah Timor Portugis yang meliputi pemantapan pemerintahan, pemantapan kehidupan ekonomi, sosial, budaya dan melaksanakan perebutan kota-kota di daerah perbatasan. Pelaksanaan operasi tahap kedua melalui Komando Tugas Gabungan (Kogasgab) yang dikendalikan langsung oleh Menhankam Pangab/Jenderal M. Panggabean. Pada operasi tahap kedua ini dapat dikuasai kota Fatularan, Atabai, Cailaco.

Operasi tempur yang digelar meliputi pendaratan satu kompi pasukan Kopasandha dan pasukan Linud di Dili serta pasukan Marinir yang diterjunkan di Kampung Arab. Pasukan yang terlibat dalam pertempuran di kota Dili berjumlah 88.471 orang yang terdiri atas unsur-unsur : Brigade 18 Linud, Grup Parako, Tim Flamboyan (Kopasandha), Yon Pasukan Pendarat (Pasrat), dan Satgas Merpati yang mengerahkan 8 C-130B, sebuah B-26, sebuah C-47 dan sebuah Cessna 401 serta Gugus Tugas Amfibi. Disiapkan pula pasukan cadangan yang terdiri atas unsur-unsur Brigade 4 KTD-AD, Resimen Artileri Medan 6, Kavaleri, unsur-unsur Banpur dan Banmin serta Gugus Tugas Amfibi.

Setelah Dili berhasil direbut, sasaran diarahkan kepada kota-kota yang berada di pantai selatan Timor Timur seperti Betano, Suai, Los Palos, Lautem dan Beaso yang pelaksanaannya mengandalkan operasi gabungan antara pasukan amfibi dari laut dan penerjunan dari udara. Kendali pasukan udara dari Jawa ke Kupang berada di tangan Hankam, sedangkan dari Kupang ke seluruh wilayah Timor Timur dikendalikan oleh Kogasgab. Kekuatan AU memiliki peranan yang sangat besar dalam operasi ini, melalui Satgasud Merpati yang bertugas memindahkan pasukan Linud langsung ke daerah sasaran, melaksanakan serbuan

lintas udara di Dili dan Baucau, menghancurkan pertahanan musuh, memberikan *air cover* dan tembakan udara secara langsung, serta memotret daerah sasaran yang akan diserang. Satgas Merpati juga bertugas melakukan pengangkutan pasukan darat, laut, kepolisian dan logistik dari daerah belakang ke pangkalan yang terdekat dengan sasaran. Sampai akhir Januari 1976 duapertiga wilayah Timor Portugis sudah dapat dikuasai pasukan TNI. Selanjutnya pada bulan Maret 1976 dilakukan penambahan kekuatan personel dan persenjataan untuk mempercepat penyelesaian operasi tempur.

2.2.4. Operasi Keamanan Laut

Mengingat kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan, TNI AL sebagai komponen utama TNI yang bertugas memelihara integritas perairan Indonesia di laut menggelar Operasi Keamanan Laut. Tugas ini dituangkan melalui UU No. 17 tahun 1985 tentang kewajiban TNI AL melaksanakan pertahanan keamanan negara di beberapa zona maritim, yaitu di perairan dalam, perairan nusantara, laut wilayah, Zona Ekonomi Eksklusif/ZEE, landas kontinen dan laut bebas.⁴²

Operasi Keamanan Laut (Kamla) bertujuan untuk mengamankan dan mencegah serta menanggulangi setiap bentuk gangguan keamanan di laut baik yang datang dari luar maupun dalam negeri demi tegaknya hukum di laut dan sebagai salah satu bagian dari operasi Kamdagri. Penyelenggaraan operasi Kamla dilaksanakan oleh Gugus Keamanan Laut (Guskamla), Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla), Satuan Tugas Keamanan Laut (Satgas Kamla) dan Komando Operasi Keamanan Laut (Koopskamla). Pelaksanaan operasi melibatkan seluruh kekuatan maritim baik dari TNI AL maupun unsur non TNI AL.

Operasi Kamla dilaksanakan secara rutin melalui patroli-patroli di kawasan perairan Indonesia di kawasan barat di bawah komando Guspurla Armabar diantaranya : Operasi Sabang Jaya yang digelar di perairan Selat Malaka dan Samudra Hindia, khususnya perairan Sumatra Utara dan Pantai Barat Sumatra, Operasi Srigunting yang meliputi perairan Belawan sampai perairan

⁴² Pusat Sejarah dan Tradisi TNI, *Sejarah TNI Jilid V :1984-2000* (Jakarta : Markas Besar TNI dan Pusat Sejarah dan Tradisi TNI, 2000), hal. 52.

timur Pulau Bintan, Operasi Natuna Jaya di perairan ZEE di Laut Cina Selatan serta Operasi Jala yang digelar di perairan Selat Malaka dan Selat Philips.

Sementara Operasi Kamla di kawasan Timur berada di bawah komando Guskamla Armatim dengan penggelaran Operasi Hiu Macan di Selat Makasar dan perairan Indonesia Timur. Operasi Kamla juga menggelar Operasi Eskader Nusantara yang merupakan operasi gabungan Armada Barat dan Timur di seluruh wilayah yurisdiksi nasional. Operasi ini dilaksanakan pada 27 Oktober sampai dengan 8 Desember 1998 dipimpin Komandan Laksamana Pertama TNI Bambang Surjanto dengan mengerahkan unsur-unsur KRI Ahmad Yani 351 (fregat), KRI Kristina Martha Tiahahu 311 (destroyer), KRI Nala 363 (korvet), KRI Teluk Madar 541 (LST) dan KRI Sorong 001 (tanker) serta dukungan satu helikopter, empat panser amfibi, dua tank dan 1000 personel.⁴³ Operasi gabungan ini beroperasi mengelilingi lautan Indonesia dari Timur sampai ke Barat dengan tugas utama untuk menegakkan kedaulatan perairan RI serta operasi penangkapan terhadap pelanggaran-pelanggaran di perairan Indonesia.

Berikut adalah tabel operasi-operasi militer yang dilaksanakan pada periode Orde Baru :

Tabel 2.3
Operasi-operasi militer yang digelar pada periode
Orde Baru (1966-1998)⁴⁴

| No. | Nama operasi | Karakter |
|-----|---------------------------------------|----------|
| 1. | Operasi Trisula | Ofensif |
| 2. | Operasi MMC (Merapi- Merbabu Complex) | Ofensif |
| 3. | Operasi Kikis | Ofensif |
| 4. | Operasi Purwodadi | Ofensif |

⁴³ Komando Armada RI Kawasan Barat, dalam *Op. Cit.*, hal. 61.

⁴⁴ Pusat Sejarah dan Tradisi TNI, *Sejarah TNI Jilid IV, 1966-1983* (Jakarta : Markas Besar TNI dan Pusat Sejarah dan Tradisi TNI, 2000); Pusat Sejarah dan Tradisi TNI, *Sejarah TNI Jilid V, 1984-2000* (Jakarta : Markas Besar TNI dan Pusat Sejarah dan Tradisi TNI, 2000).

| | | |
|-----|----------------------------------|----------|
| 5. | Operasi Tertib I | Ofensif |
| 6. | Operasi Tertib II | Ofensif |
| 7. | Operasi Sapu Bersih I | Defensif |
| 8. | Operasi Sapu Bersih II | Ofensif |
| 9. | Operasi Sapu Bersih III | Defensif |
| 10. | Operasi Sadar | Defensif |
| 11. | Operasi Pamungkas | Defensif |
| 12. | Operasi Gajah Cakti | Ofensif |
| 13. | Operasi Sandi Yudha | Ofensif |
| 14. | Operasi Jeumpa | Defensif |
| 15. | Operasi Jeumpa II | Ofensif |
| 16. | Operasi Seroja | Defensif |
| 17. | Operasi Flamboyan | Defensif |
| 18. | Operasi Bharata Yudha | Ofensif |
| 19. | Operasi Woyla (Teror Imron) | Ofensif |
| 20. | Operasi Warman | Ofensif |
| 21. | Operasi Garuda (Warsidi) | Ofensif |
| 22. | Operasi Jaring Merah | Defensif |
| 23. | Operasi Rencong Sakti | Defensif |
| 24. | Operasi Wibawa 99 | Defensif |
| 25. | Operasi Penumpasan Xanana Gusmao | Ofensif |
| 26. | Operasi Marore Jaya | Defensif |
| 27. | Operasi Sapu Pukat Harimau | Defensif |
| 28. | Operasi Trisila VI | Defensif |
| 29. | Operasi Buru Sergap 97 Karmabar | Defensif |

| | | |
|-----|--|----------|
| 30. | Operasi Hiu Macan I | Defensif |
| 31. | Operasi Hiu Macan II | Defensif |
| 32. | Operasi Hiu Macan III | Defensif |
| 33. | Operasi Sabang Jaya | Defensif |
| 34. | Operasi Srigunting | Defensif |
| 35. | Operasi Natuna Jaya | Defensif |
| 36. | Operasi Jala | Defensif |
| 37. | Operasi Khusus | Defensif |
| 38. | Operasi Patroli Koordinasi Indonesia-Singapura | Defensif |
| 39. | Operasi Eskader Nusantara | Defensif |

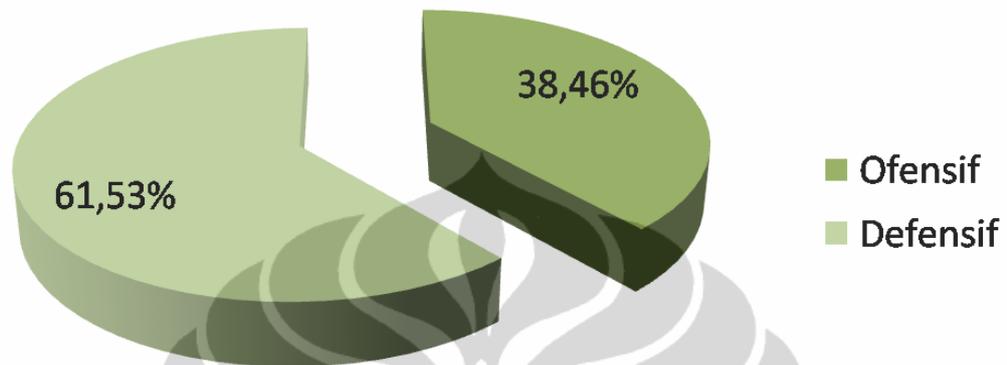
Sumber : diolah dari tabulasi operasi militer yang bersumber dari Pusat Sejarah dan Tradisi TNI, *Sejarah TNI Jilid IV, 1966-1983* (Jakarta : Markas Besar TNI dan Pusat Sejarah dan Tradisi TNI, 2000); Pusat Sejarah dan Tradisi TNI, *Sejarah TNI Jilid V, 1984-2000* (Jakarta : Markas Besar TNI dan Pusat Sejarah dan Tradisi TNI, 2000).

Dari tabel 2.2 dapat disimpulkan bahwa operasi-operasi militer yang digelar pada periode Orde Baru didominasi oleh ancaman-ancaman yang sifatnya internal seperti penumpasan G 30 S/PKI dengan 9 operasi militer, penumpasan GPK OPM di Irian Jaya dengan 2 operasi militer, penumpasan GAM di Aceh dengan 8 operasi militer, serta operasi penumpasan Xanana Gusmao dengan 1 operasi militer, 3 operasi militer eksternal digelar dalam menghadapi Timor Potugis serta operasi kontra-terorisme yaitu Teror Woyla dan Teror Imron. Selain itu TNI juga menggelar operasi-operasi Keamanan Laut (Kamla) yaitu sebanyak 14 operasi Kamla.

Dari 39 kali operasi-operasi militer yang digelar pada periode Orde Baru juga dapat kita ketahui bahwa sebagian besar operasi militer yang digelar berkarakteristik defensif (24 operasi militer) sementara sisanya berkarakteristik ofensif (15 operasi militer). Berikut adalah prosentase karakteristik operasi-operasi militer pada periode Orde Baru.

Grafik 2.2

Karakteristik Operasi Militer periode Orde Baru (1966-1998)



Grafik 2.2 menggambarkan bahwa dari 39 kali penyelenggaraan operasi militer yang digelar pada periode Demokrasi Terpimpin, 61,53% diantaranya menekankan pada karakter defensif sedangkan 38,46% operasi militer sisanya berkarakteristik ofensif. Hal ini menunjukkan bahwa doktrin pertahanan Indonesia yang merupakan pedoman bagi penyelenggaraan operasi-operasi militer pada periode Orde Baru lebih menekankan pada karakter defensif.

2.3. Kesimpulan

Doktrin pertahanan pada hakekatnya adalah pedoman dan penuntun dalam penyelenggaraan pertahanan negara baik dalam keadaan keadaan damai maupun perang. Penyelenggaraan pertahanan tersebut diturunkan ke dalam suatu strategi yang pada akhirnya akan diimplementasikan ke dalam operasi-operasi militer. Untuk mengetahui karakter suatu doktrin pertahanan apakah karakternya ofensif atau defensif dapat dilihat dari karakter operasi-operasi militernya apakah lebih menekankan unsur ofensif ataukah lebih menekankan pada unsur defensif.

Pada periode Demokrasi Terpimpin operasi-operasi militer yang digelar baik dalam kerangka perebutan Irian Barat, konfrontasi Malaysia maupun operasi-

operasi kamdagri untuk menumpas pemberontakan bersenjata lebih menekankan pada motif yang agresif, perlucutan kekuatan lawan dan ekspansionis, penyelenggaraan operasi-operasi gabungan ketiga matra dengan pentahapan operasi demi dicapainya hasil dan tujuan dengan cepat menunjukkan karakter operasi militer yang ofensif. Sedangkan pada periode Orde Baru operasi-operasi militer yang digelar lebih menekankan pada penjagaan dan proteksi wilayah serta tujuannya yaitu untuk menolak serangan musuh (*denial*) melalui tindakan-tindakan *pre-emptive* (pencegahan) menunjukkan karakter operasi militer yang defensif.

Penggelaran kekuatan militer melalui operasi-operasi pada periode Demokrasi Terpimpin yang didominasi oleh unsur-unsur ofensif maupun periode Orde Baru yang didominasi oleh unsur-unsur defensif, menunjukkan terjadinya variasi dalam operasi militer pada kedua periode tersebut. Operasi militer yang merupakan implementasi dari strategi pertahanan suatu negara yang dituntun oleh doktrin pertahanannya merepresentasikan karakter doktrin pertahanan Indonesia yang mengalami variasi pada kedua periode tersebut.